

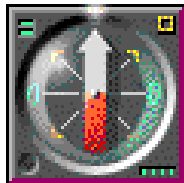
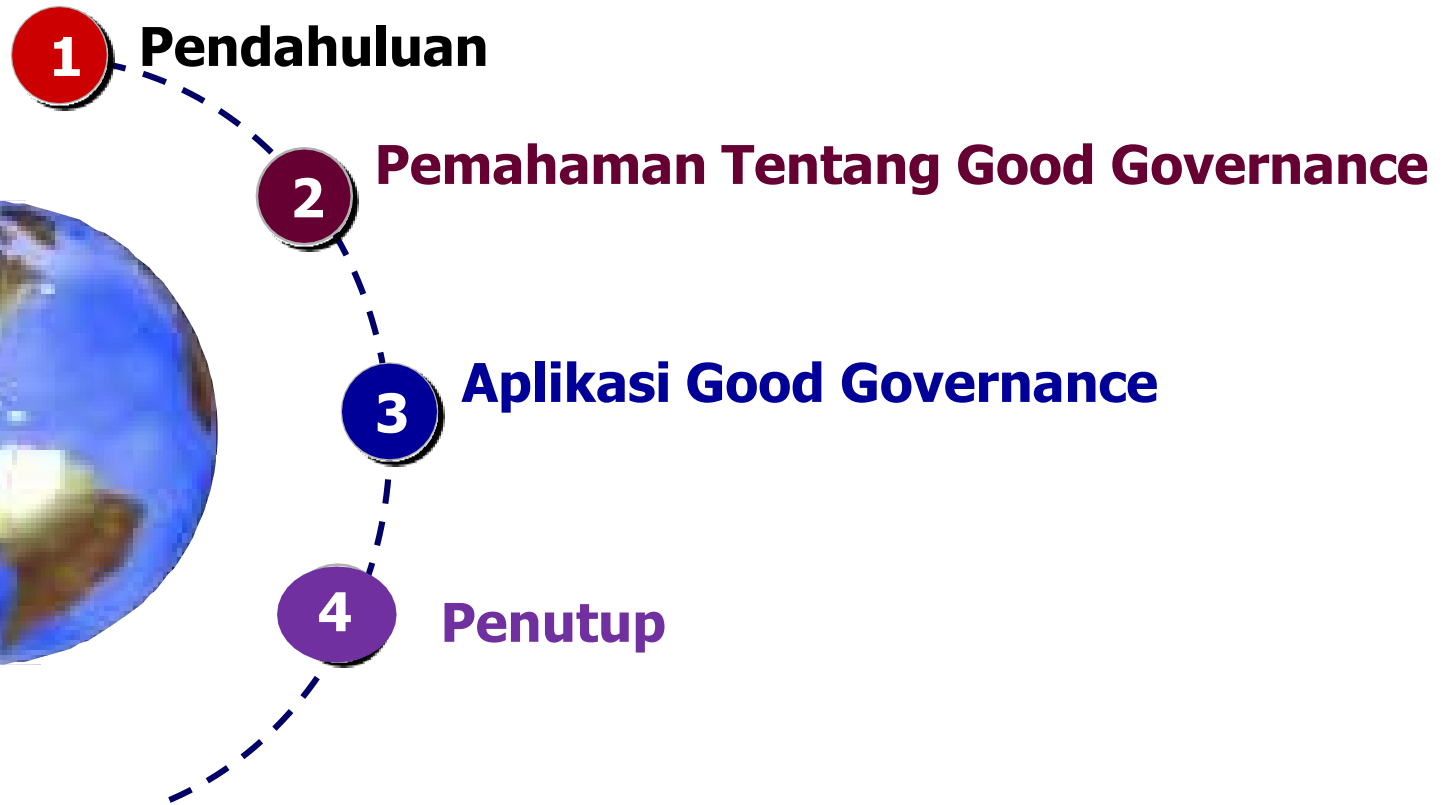


KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA AIR KONSTRUKSI
Jl. Abdul Hamid, Cicaheum – Bandung 40193, Telp. (022) 7206892, Fax. 7236224

GOOD GOVERNANCE



Materi





Pendahuluan



Latar Belakang



- Pada berbagai Negara, **penggunaan prinsip-prinsip administrasi publik klasik semakin tidak compatible dengan tuntutan perkembangan masyarakat dan dunia internasional, yang semakin transparan.**
- Hal ini juga sejalan dengan **berkembangnya teknologi komunikasi yang serba cepat dan efisien**, sehingga waktu yang semakin singkat dalam penyampaian informasi, dan kecanggihannya menyebabkan semua aspek kegiatan dalam kehidupan dapat diketahui dengan mudah.
- Indonesia, sebagai bagian dari komunitas dunia, juga tidak terlepas dari pengaruh perubahan tersebut, **menuntut adanya efisiensi, efektifitas dan transparansi** pada semua bidang, terutama dalam manajemen pemerintahan.
- **Perubahan mekanisme ini menuntut terlaksananya prinsip good governance**

•

Latar Belakang



- Penerapan prinsip good governance di Indonesia mulai diperkenalkan pada masa reformasi, yang telah merombak pola sentralisasi kekuasaan pada masa orde baru, menjadi pola desentralisasi dengan memberikan kewenangan pengaturan kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri.
- Maksud pemberian kewenangan tersebut salah satunya antara lain adalah untuk mendekatkan pelayanan pemerintah kepada rakyatnya yang lebih cepat dan tepat
- Untuk itu, transparansi pelaksanaan kegiatan sangat dituntut agar dapat memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat.

•

Latar Belakang



Pada berbagai Negara, **penggunaan prinsip-prinsip administrasi publik klasik semakin tidak compatible dengan tuntutan perkembangan masyarakat dan dunia internasional, yang semakin transparan.**

Hal ini juga sejalan dengan **berkembangnya teknologi komunikasi yang serba cepat dan efisien, sehingga waktu yang semakin singkat dalam penyampaian informasi, dan kecanggihannya menyebabkan semua aspek kegiatan dalam kehidupan dapat diketahui dengan mudah.**

Indonesia, sebagai bagian dari komunitas dunia, juga tidak terlepas dari pengaruh perubahan tersebut, **menuntut adanya efisiensi, efektifitas dan transparansi** pada semua bidang, terutama dalam manajemen pemerintahan.

Perubahan mekanisme ini menuntut terlaksananya prinsip good governance

Tujuan Pelatihan Good Governance



- **Tujuan Pelatihan Good Governance** dimaksudkan agar peserta pelatihan dalam melaksanakan tugas dapat melihat lingkup yang lebih luas dalam pemahaman yang berkaitan antara pekerjaan dengan visi dan misi organisasi dan masalah bangsa yang dihadapi.
- Dengan berbasis pada wawasan yang lebih terbuka, maka akan tumbuh rasa nasionalisme yang tinggi dan tanggung jawab dalam menciptakan kesejahteraan bangsa.



VISI PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

Terwujudnya Indonesia berdaulat, mandiri,
dan berkepribadian berdasarkan gotong
royong

Misi Pemerintah Indonesia

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dan mengamankan sumber daya maritim dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeadilan dan demokratis berlandaskan negara hukum.
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas aktif dan memperkuat diri sebagai negara maritim.
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera.
5. Mewujudkan Bangsa yang berdaya saing.
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara Maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional.
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

SASARAN OUTPUT INFRASTRUKTUR PUPR

DUKUNGAN SEKTOR JALAN

- 1.000 km Konstruksi jalan bebas hambatan
- 47.017 km Pemeliharaan jalan nasional
- 500 km Dukungan jalan daerah
- 2.650 km Pembangunan jalan nasional
- 28.059 m Pembangunan Jembatan

- terhadap pembangunan **24 Pelabuhan baru**
- terhadap **pelabuhan penyeberangan di 60 lokasi**
- terhadap restrukturisasi jaringan **jalan perkotaan**
- terhadap pembangunan **jalan lingkar perkotaan** di Metropolitan dan kota besar
- terhadap **15 kawasan industri prioritas**
- terhadap **kawasan pariwisata pada 25 KSPN prioritas**
- terhadap pembangunan **15 Bandara baru**
- terhadap intermoda dengan **jalur KA**



SEKTOR PERUMAHAN

- Fasilitasi PSU untuk Pembangunan Rumah Umum Tapak Layak Huni: **676.950** unit
- Pembangunan Rumah Khusus : **50.000** unit
- **Pembangunan Rumah Susun : 550.000** unit
- Bantuan Stimulan Pembngnan Rumah Swadaya: **250.000** unit dan Peningkatan Kualitas 1.5 jt



DUKUNGAN SEKTOR SUMBER DAYA AIR

- pembangunan **65** waduk
- 1 juta Ha** Irigasi Baru
- 67,52 m3/detik** Air Baku [intake, jaringan, embung]
- 3 juta Ha** Rehabilitasi Irigasi
- Pengendalian Banjir** [normalisasi sungai, kanal banjir, bangunan pengendali banjir, dll]
- Pengamanan abrasi pantai 500 Km



DUKUNGAN SEKTOR CIPTA KARYA

INDIKATOR	KONDISI AKHIR THN 2014	TARGET AKHIR THN 2019
Akses Air Minum Layak Kawasan permukiman kumuh perkotaan	70 %	100 %
Akses Sanitasi Layak	38.431 Ha	0 ha
	62 %	100 %

3 ribu km

TIGA PROBLEM POKOK BANGSA

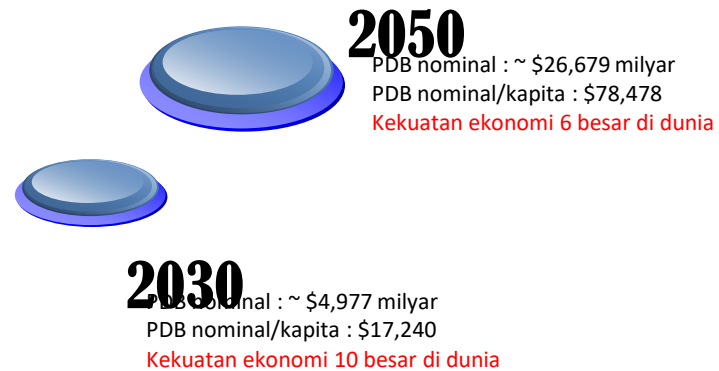
1. **Merosotnya kewibawaan negara**
2. **Melemahnya sendi-sendi perekonomian nasional**
3. **Merebaknya intoleransi dan krisis kepribadian Bangsa**

Masalah ini semua bisa terpecahkan kalau **Pola Good Governance dilaksanakan secara konsekwen oleh Masyarakat Indonesia terutama oleh Aparatur Sipil Negara.**

PELUANG DAN TANTANGAN PEMBANGUNAN INDONESIA

- Sebagai negara dengan kekayaan alam melimpah dan populasi keempat terbesar di dunia, sudah selangkah Indonesia menjadi kekuatan besar ekonomi dunia.
- Dengan pertumbuhan ekonomi yang diharapkan melesat sampai dengan sebesar 7% per tahun, Morgan Stanley optimis bahwa Indonesia layak dimasukkan sebagai negara '1' kedua setelah India di negara-negara BRIC (Brazil, Rusia, India, dan Cina).
- Menggunakan prediksi moderat menurut EIU, Indonesia diperkirakan mencapai PDB nominal sebesar \$4,977 milyar di tahun 2030 dan \$26,679 milyar di tahun 2050.
- Dengan kondisi tersebut, diperkirakan bahwa Indonesia paling tidak mampu menjadi kekuatan 10 besar dunia di tahun 2030 dan 6 besar dunia pada tahun 2050.
- Untuk mencapai hal tsb diperlukan pelaksanaan Good Governance secara konsekwen dan berkesinambungan oleh seluruh rakyat Indonesia baik ditingkat eksekutif, Legeslatif dan Yudikatif termasuk pihak Swasta dan Masyarakat.

Indonesia menjadi kekuatan 10 besar dunia di tahun 2030 dan 6 besar dunia pada tahun 2050



Sumber : IMF, EIU, Goldman Sachs

Tujuan Pelatihan Good Governance



- Pemahaman atas dasar Good Governance ini pula yang akan mendorong Aparatur Sipil Negara **selalu bekerja dengan baik, serta berusaha untuk meningkatkan kualitas diri demi kesempurnaan dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.**



Manfaat Pelatihan Bagi Peserta Diklat



- **Manfaat Pelatihan Bagi Peserta Diklat Investasi infrastruktur adalah sebagai fasilitator internal akan memahami dan memfasilitasi pentingnya good governance untuk pelayanan terhadap stake holder disamping kegiatan kerjasama pemerintah dan badan usaha, sehingga peserta diharapkan akan lebih berdedikasi dalam melaksanakan tugasnya.**
- **Dedikasi akan menumbuhkan rasa tanggung jawab dan keinginan untuk kesempurnaan pekerjaan.**
- **Dengan demikian Peserta akan bersemangat menunjukkan kinerja yang menjadi ciri ASN pada masa reformasi, siap menghadapi tantangan yang datang dari dalam maupun dari luar.**

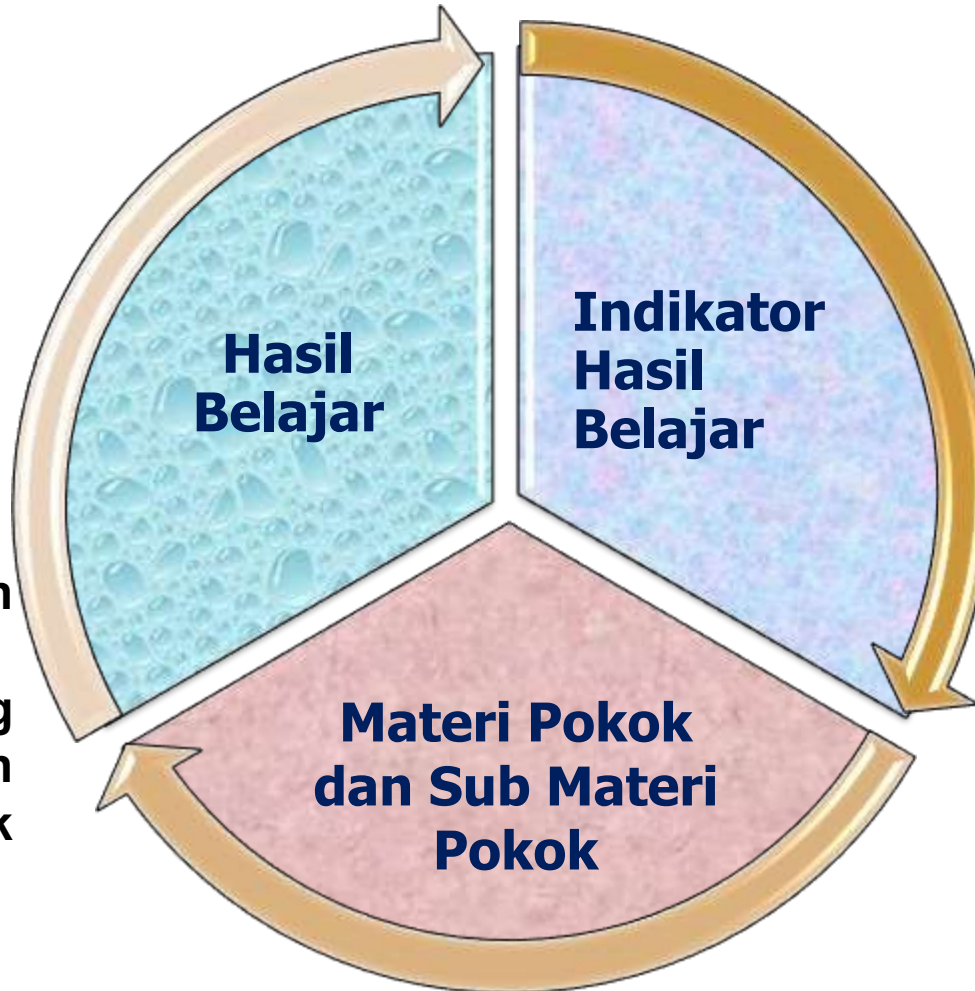
Tujuan Pembelajaran



Hasil Belajar :

peserta diharapkan lebih berdedikasi dalam melaksanakan tugasnya. Dedikasi akan menumbuhkan rasa tanggung jawab dan keinginan untuk kesempurnaan pekerjaan.

Pemahaman Tentang *Good Governance*
Pemahaman tentang *Reinventing Governance*



Indikator Hasil Belajar :

Memahami peran dan kedudukannya dalam konteks pembangunan nasional;

Memberikan wawasan yang lebih utuh tentang fungsinya dalam proses kerjasama pemerintah dengan badan usaha.

Meningkatkan apresiasi pada sektor lain yang turut berperan dalam proses pembangunan.



1

Pemahaman Tentang *God Governance*



Apa yang disebut Good Governance

- **Good Governance adalah suatu peyelenggaraan manajemen pembangunan yang sistimatis dan bertanggung jawab sejalan dengan prinsip demokrasi yang efisien serta menghindarkan salah alokasi dana dan mencegah terjadinya korupsi serta kolusi baik secara politik maupun secara administratif dengan menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal dan politican framework bagi tumbuhnya aktifitas usaha.**
-
-



Apa yang disebut Good Governance



- **Good governance pada dasarnya adalah suatu konsep yang mengacu kepada proses pencapaian keputusan dan pelaksanaannya yang dapat dipertanggungjawabkan secara bersama**
- .
- **Sebagai suatu konsensus yang dicapai oleh pemerintah, warga negara, dan sektor swasta bagi penyelenggaraan pemerintahan yang optimal dalam suatu negara.**



Apa yang disebut Good Governance

Menurut UNDP (*United National Development Planning*), *Good Governance* diartikan sebagai praktik dalam penerapan kewenangan pengelolaan berbagai urusan penyelenggaraan negara secara politik, ekonomi dan administrative di semua tingkatan.

- Dalam konsep menurut UNDP tersebut, ada tiga pilar *Good Governance* yang penting, yaitu:
 - Kesejahteraan rakyat (*economic governance*).
 - Proses pengambilan keputusan (*political governance*).
 - Tata laksana pelaksanaan kebijakan (*administrative governance/Business Process*)



Apa yang disebut Good Governance

Good governance mulai diterapkan di Indonesia pasca meletusnya **revolusi orde baru pada tahun 1998 yang melahirkan era reformasi di Indonesia.**

Era reformasi diharapkan mampu **membawa Indonesia ke arah yang lebih baik lagi, oleh sebab itu untuk menuju Good Governance dibentuklah salah satunya dengan Reformasi Birokrasi .**

Ada 3 (tiga) Pilar Reformasi Birokrasi menuju Good Governance yaitu :

- **SDM Yang Profesional**
- **Organisasi yang Rightsizing**
- **Business Process yang efisien, efektif dan transparant.**



Apa yang disebut Good Governance

📖 Untuk memahami *good governance*, maka perlu mengetahui integrasi antar 3 aktor utama tersebut, dalam suatu mekanisme kerja yang diakui oleh para pihak. **Peran pemerintah harus mampu** menciptakan suatu iklim yang kondusif bagi terselenggaranya berbagai kegiatan (ekonomi, politik, budaya, keamanan, peraturan). **Adapun sektor swasta** akan berperan dibidang pengembangan kegiatan perekonomian yang mampu memberi peluang masyarakat untuk mendapatkan penghasilan lebih baik sehingga kesejahteraannya meningkat. **Sedangkan peran masyarakat, adalah** tuntutan kemampuan untuk mengisi peluang yang tercipta dibidang ekonomi, social, budaya maupun politik, serta melakukan pemantauan terhadap mekanisme *good governance* tersebut



Pengertian dan Konsepsi



Agar dapat memahami *good governance* secara baik, perlu memahami hal-hal berikut:

- **Memiliki visi jauh kedepan, sehingga mampu untuk menentukan kebijakan dan arah pembangunan yang akurat. Visi harus dapat diterjemahkan menjadi misi untuk kemudian dijabarkan menjadi program kegiatan.**
- **Memfasilitasi adanya partisipasi masyarakat, yaitu memberikan kesempatan pada masyarakat untuk menyampaikan pendapatnya, baik langsung maupun melalui perwakilannya.**
- **Menghormati dan mengakui supremasi hukum, yaitu melaksanakan semua proses berdasarkan ketentuan dan peraturan, dilaksanakan secara konsisten sehingga menciptakan rasa adil yang merata.**
- **Keterbukaan informasi, atau transparansi, yaitu memungkinkan pihak-pihak berkepentingan memperoleh data yang terkait kepentingan, dan siap untuk mendapat evaluasi penyelenggaraan.**

Apa yang disebut Good Governance

- Pelayanan kepada pemangku kepentingan, yaitu memberikan layanan yang merata kepada pihak-pihak berkepentingan secara baik. Prinsip efisiensi, jelas, cepat, murah dan mudah harus menjadi acuan dalam bekerja.
- Mengutamakan kesepakatan pelaksanaan, yaitu berupaya agar setiap kepentingan dapat diakomodasi dalam mewujudkan kepentingan masyarakat. Kesepakatan harus disusun secara tertulis dan dijadikan acuan dalam pelaksanaan kegiatan.
- Akuntabilitas, yaitu kegiatan harus dapat dipertanggung jawabkan. Termasuk dalam hal ini adalah unsur-unsur: transparansi, supremasi hukum, prosedural, profesionalitas, dan kualitas pekerjaan.



Landasan Utama Konsep *Good Governance*





Sebagaimana telah berulang disebutkan dalam uraian terdahulu, maka prinsip *good governance* adalah sinergitas antara 3 pelaku yaitu: pemerintah sebagai pengatur dalam pelayanan masyarakat, serta masyarakat bersama swasta pelaksanaan organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka memberikan pelayanan.



Pemerintah yang berfungsi dalam pengaturan, berperan dalam melakukan pengarah, fasilitasi pembangunan, dan membuka peluang seluasnya kepada masyarakat dan swasta untuk berperan dalam pembangunan. Sementara itu, swasta sebagai pelaku utama kegiatan pembangunan, menciptakan pergerakan ekonomi yang tinggi sehingga menciptakan kesempatan kerja yang besar. Kontribusi peran swasta tersebut dapat memberikan penerimaan yang besar kepada pemerintah, pusat dan daerah. Sedangkan masyarakat sebagai salah satu pelaku prinsip *good governance*, berperan dalam pengembangan dan penguatan kelembagaan yang mampu tumbuh dengan kekuatan sendiri, dan membangun kerjasama dengan berbagai pihak dalam rangka proses produksi maupun pemasaran. Ini berarti bahwa masyarakat harus diberdayakan agar memiliki kemampuan yang sebagaimana

Apa yang disebut Good Governance

-  Lebih jauh lagi, keterlibatan 3 pelaku good governance seluruhnya harus berorientasi pada kepentingan masyarakat.
-  Rincian peran dan fungsi sebagai berikut: Peran Negara, **Peran sektor swasta dan Peran masyarakat dalam mewujudkan pemerintah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia no. 68 tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara**



Apa yang disebut Good Governance

- Lebih jauh lagi, keterlibatan 3 pelaku good governance seluruhnya harus berorientasi pada kepentingan masyarakat.
- **Rincian peran dan fungsi sebagai berikut: Peran Negara, Peran sektor swasta dan Peran masyarakat dalam mewujudkan pemerintah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia no. 68 tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara**



Apa yang disebut Good Governance

- Reformasi pemerintahan Indonesia, disertai pula dengan diterbitkannya **Undang-undang no. 22 tahun 1999, serta diganti dengan undang-undang 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri dan berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan perundang-undangan.**
- Berdasarkan pada undang-undang tersebut, maka sebagian besar kewenangan yang ada pada pemerintah pusat, dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah. Maksud pelimpahan ini adalah mendekatkan pelayanan pemerintah kepada rakyatnya sehingga rentang pengendalian lebih singkat dan pelayanan masyarakat dapat dilaksanakan dengan cepat dan akurat



Desentralisasi dan Reformasi Pelayanan Publik



Aspek-aspek yang dilimpahkan antara lain meliputi **formasi jabatan, pengawasan keuangan, dan pelayanan publik (masyarakat)**. Pelimpahan kewenangan ini juga akan mendorong Pemerintah Daerah agar lebih mampu membangun manajemen kelembagaan yang baik, dan menyusun suatu standar pelayanan publik yang sesuai dengan karakteristik masyarakat setempat. Terselenggaranya pelayanan publik secara baik, adalah merupakan tugas dari pemerintahan yang baik (*good governance*). Kepuasan masyarakat atas mutu pelayanan oleh pemerintah, menjadi ukuran baik atau tidaknya suatu aparatur pemerintah dalam menjalankan tugasnya. Kualitas pelayanan publik yang baik, adalah akibat adanya kontrol dari masyarakat, dan kemudahan kontrol terjadi karena adanya transparansi pelaksanaan. Dengan demikian, “transparansi” merupakan suatu faktor kunci untuk mewujudkan manajemen yang baik, karena pelayanan akan dilaksanakan secara jujur, taat aturan, dan bertanggung jawab.

Apa yang disebut Good Governance



-  Suatu penyelenggaraan *good governance* yang bertanggung jawab, **harus memiliki perangkat alat pengendali berupa standar pelayanan.** Pengaturan kembali berupa deregulasi dan debirokratisasi harus dilakukan secara menerus, agar pelayanan masyarakat dapat maksimal.



Desentralisasi dan Reformasi Pelayanan Publik

A background image showing a group of business professionals in a meeting. One man in a white shirt and tie is pointing at a large screen or whiteboard, while others in suits look on attentively. The scene is set in a modern office environment with a blue and green color palette.

Ada 5 perangkat yang harus disiapkan dalam rangka perbaikan pelayanan publik, yaitu:

- **Terbentuknya Sistem pelayanan (satu atap)**
- **Peraturan perundangan mengenai pelayanan publik,**
- **Transparansi biaya untuk pelayanan publik,**
- **Prosedur standar operasional,**
- **Reformasi mindset, sikap dan perilaku serta mental petugas dalam melakukan pelayanan.**

Apa yang disebut Good Governance



Untuk mencapai tujuan mulia dalam pelayanan publik, maka harus dilakukan penataan administrasi negara dan birokrasi pemerintahan dalam rangka membangun kinerja pemerintahan yang efektif, efisien, dan profesional. Perubahan sikap pemerintah dari perilaku yang lamban, birokratis, kaku, menjadi perilaku yang trampil, efisien, akomodatif, **maka akan menempuh dengan cara *Reinventing Government*.**





2


PEMAHAMAN TENTANG *REINVENTING GOVERNMENT*




Pemahaman Re Inventing Government



Konsep Dasar Penentuan Prioritas (Priority Setting)


 ***re inventing*** diartikan sebagai penemuan kembali, atau dapat diinterpretasikan sebagai ***interpreneur***. Sedangkan pengertian ***government*** diartikan sebagai pemerintahan, yaitu suatu kewenangan kekuasaan untuk mengatur seluruh aspek kehidupan untuk kesejahteraan rakyat. Untuk itu pula suatu pemerintah mengemban tugas untuk membangun suatu negeri **meliputi infrastruktur, pelayanan umum, pelayanan social, pengaturan pembangunan fisik, social dan ekonomi, sampai dengan menentukan kebijakan politik.**

 ***government*** diartikan sebagai pemerintahan, yaitu suatu **kewenangan kekuasaan untuk mengatur seluruh aspek kehidupan untuk kesejahteraan rakyat.** Untuk itu pula suatu pemerintah mengemban tugas untuk membangun suatu negeri meliputi infrastruktur, pelayanan umum, pelayanan social, pengaturan pembangunan fisik, social dan ekonomi, sampai dengan menentukan kebijakan politik.

Pemahaman Re Inventing Government



Konsep Dasar Penentuan Prioritas (Priority Setting)

 Pengertian *re inventing government*, dapat ditafsirkan sebagai **pengaturan kembali system pemerintahan dengan cara baru yang inovatif/Kewirausahaan**. Pola pemerintahan lama yang birokratis, dinilai tidak efisien dalam perkembangan zaman, sehingga perlu disusun kembali dengan melakukan pemangkasan birokrasi.

Prinsip-prinsip *reinventing government*



Menurut Osborne dan Gaebler dalam bukunya yang berjudul *Reinventing Government*, sepuluh prinsip mewirausahakan birokrasi adalah sebagai berikut:

- a. **Pemerintahan katalis (*Catalytic Government : Steering Rather Than Rowing*)**. Pemerintah berfokus pada pemberian pengarahan .
- b. **Pemerintah milik masyarakat (*Community-Owned Government : (Empowering Rather Than Serving)*)**. Pemerintah hendaknya lebih berorientasi untuk memberdayakan masyarakat tidak sekedar melayani.
- c. **Pemerintah yang kompetitif (*Competitive Government : Injecting Competition into Service Delivery*)**. Pemerintah perlu memunculkan semangat kompetisi dalam pemberian pelayanan publik.

Prinsip-prinsip *reinventing government*



- d. **Pemerintah yang digerakkan oleh misi (*Mission-Driven Government : Transforming Rule-Driven Organizations*).** Mengubah organisasi yang digerakkan oleh peraturan menjadi organisasi yang digerakkan oleh misi.

- e **Pemerintahan yang berorientasi hasil (*Results-oriented government : Funding Outcomes, Not Inputs*).** Pemerintah berorientasi hasil mampu membiayai hasil bukan masukan.

Prinsip-prinsip *reinventing government*



- f. Pemerintahan berorientasi pada pelanggan (***Customer-Driven : Meeting the Needs of the Customer, Not the bureaucracy***)
 - . Memenuhi kebutuhan pelanggan, bukan birokrasi.
- g. Pemerintahan wira usaha (***Enterprising Government : Earning Rather than Spending***). Menciptakan pendapatan dan tidak sekedar membelanjakan.
- h. Pemerintah antisipatif (***Anticipatory Government : Prevention Rather than Cure***). Berupaya mencegah daripada mengobati.

Prinsip-prinsip *reinventing government*



- .
 - i. Pemerintah desentralisasi (***Decentralized Government : From Hierarchy to Participation and Team Work***). Dari hierarki menuju partisipatif dan kerja tim.
 - j. Pemerintah berorientasi pada (mekanisme) pasar (***market-Oriented Government : Laveraging Change Through the Market***). Mengadakan perubahan dengan mekanisme pasar (sistem insentif) dan bukan dengan mekanisme administratif (**sistem prosedur pemaksaan**)

Prinsip-prinsip *reinventing government*



Dari **prinsip reinventing government** yang disampaikan **David Osborne**, maka terkandung 5 prinsip yang merupakan intinya, yaitu:

- 1. *Steering***, dalam hal ini pemerintah memfasilitasi dan mengarahkan tuntutan dan keinginan masyarakat dan memformulasikannya dalam bentuk peraturan. Sedangkan untuk pelaksanaan kegiatannya secara fisik, diserahkan pada masyarakat atau kepada swasta.
- 2. *Empowering***, pemerintah menitik beratkan pada pemberdayaan masyarakat agar kapasitas masyarakat dapat meningkat, sehingga dapat berkiprah dalam kegiatan pembangunan. Masyarakat yang membangun untuk memenuhi kebutuhannya sendiri, akan lebih berdedikasi dan bersungguh-sungguh dalam melaksanakan pembangunan.
- 3. *Meeting the need of the consumer, not the beureaucracy***, pemerintah harus dapat memahami kebutuhan masyarakat sebagai pelanggan karena tugas pemerintah sebagai penyedia layanan publik. Dengan demikian, tuntutan kualitas produk juga ditentukan masyarakat.

Prinsip-prinsip *reinventing government*



4. ***Earning***, ini bentuk penghematan anggaran belanja pemerintah, yaitu lebih mengutamakan penghasilan dari pada pembelanjaan. Oleh karena itu, sebagian tugas pemerintah dilimpahkan kepada lembaga non pemerintah, sehingga struktur organisasi pemerintah menjadi ramping.
5. ***Prevention***, pemerintah antisipatif, yaitu melakukan kebijakan dan tindakan yang sifatnya antisipatif karena pencegahan adalah lebih baik dari pada perbaikan.



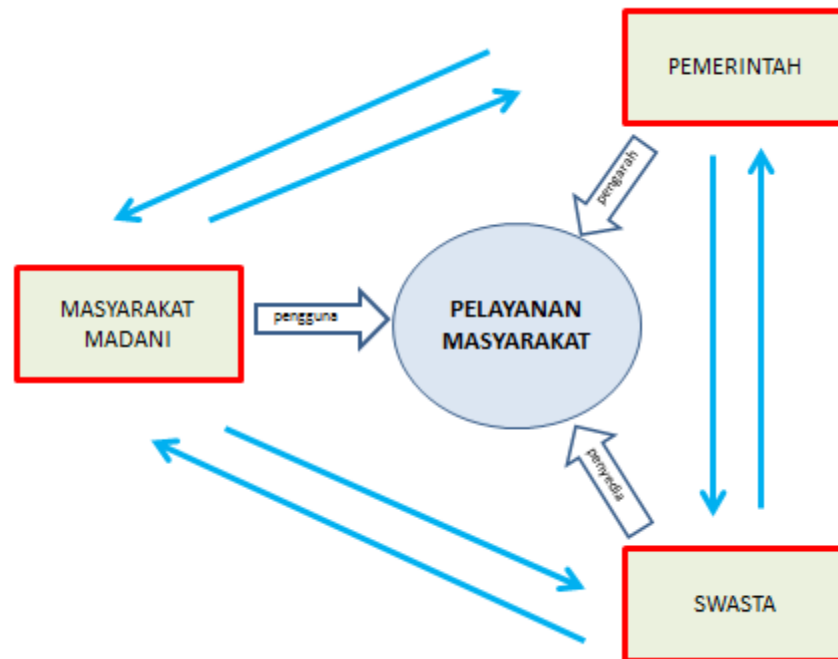
3

APLIKASI *GOOD* *GOVERNANCE* DALAM KPBU



Mencapai good governance melalui reinventing government

Good governance melahirkan suatu tata pemerintahan yang kokoh, karena melibatkan 3 pihak yaitu: pemerintah, swasta, dan masyarakat. Pembagian peran satu dengan lain tersebut, dapat ditafsirkan sebagai pembagian beban dalam pelayanan masyarakat, sehingga setiap pihak dapat bekerja secara optimal



Peran masyarakat madani dalam *good governance*



Mewujudkan ***good governance*** dengan menyertakan masyarakat sebagai salah satu aktor penentunya, merupakan suatu upaya agar masyarakat memaknainya sebagai pemilik negeri, dan bertanggung jawab atas **kemajuan negaranya**. Sesuai dengan prinsip *reinventing government* untuk melakukan pemberdayaan masyarakat, maka pemerintah berperan untuk memberdayakan (*empowering*) masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan.



Peran masyarakat madani dalam *good governance*



Bentuk pemberdayaan dapat berupa **pelatihan, pendidikan, pemagangan, dan dapat juga dalam bentuk pemberian peran.** Salah satu peran konkrit masyarakat dalam pembangunan adalah **melakukan analisa dan advokasi dalam kebijakan pembangunan.** Namun peran serta ini harus diimbangi dengan kemudahan mendapatkan informasi, serta memiliki kompetensi dengan permasalahan yang dibahas. **Peran masyarakat adat, menampilkan adanya karakteristik kehidupan masyarakat lokal, juga akan menjadi masukan dalam penentuan program pembangunan, termasuk didalamnya menghormati kearifan lokal serta melestarikan budaya setempat.**

Peran masyarakat madani dalam *good governance*



Masyarakat juga dapat **dimobilisasi untuk melakukan pembangunan daerahnya sendiri**. Aparat pemerintah yang berwenang dapat melakukan dampingan dan pengarahan terhadap kekuatan masyarakat tersebut.

Terkait dengan penegakan *good governance*, maka masyarakat sebagai pemilik negeri perlu dilibatkan dalam penyusunan program pembangunan, sehingga aspirasi mereka sebagai pengguna hasil-hasil pembangunan dan pelayanan masyarakat dapat terakomodasi. Keikutsertaan masyarakat dalam program juga akan menumbuhkan rasa tanggung jawab dengan cara melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap kegiatan pelayanan

Langkah Penerapan *Good Governance* Dalam Pelaksanaan KPBU



Peraturan Presiden Republik Indonesia no. 38 tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha (KPBU) Dalam Penyediaan Infrastruktur, mengamanatkan bahwa KPBU adalah kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur untuk kepentingan umum yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya Badan Usaha, dengan memperhatikan pembagian resiko diantara para pihak.

Langkah Penerapan *Good Governance* Dalam Pelaksanaan KPBU



Secara umum terlihat bahwa **pelaksanaan pembangunan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada Peraturan Presiden di atas, melibatkan pihak pemerintah, dan pihak swasta/badan usaha.** Sistem kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dapat diinterpretasikan bahwa pembangunan infrastruktur dan tanggung jawab pengelolaannya dilimpahkan kepada Badan Usaha dengan tanggung jawab dan konsekwensi yang terbagi.

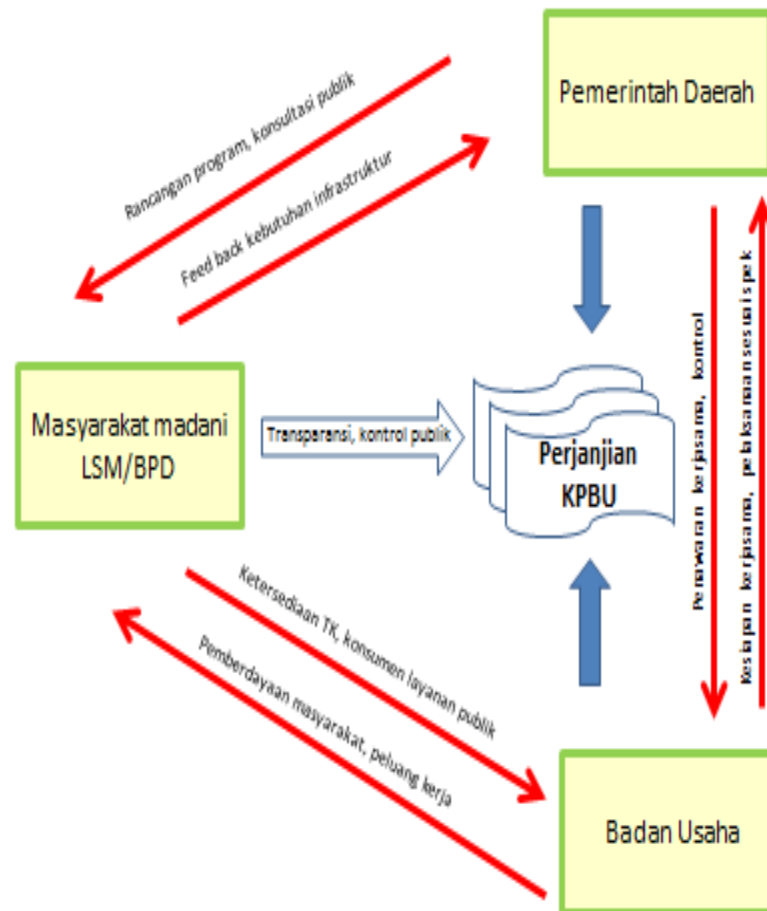
Langkah Penerapan *Good Governance* Dalam Pelaksanaan KPBU



Penyertaan masyarakat dalam kegiatan KPBU terakomodasi dalam Peraturan Presiden 38/2015, adalah pada pasal 23 yang berbunyi: **dalam melakukan identifikasi KPBU, Menteri/kepala Lembaga/Kepala Daerah melakukan konsultasi publik**, yang kemudian dilanjutkan pada pasal 25 ayat 3 sebagai berikut: **daftar rencana KPBU diumumkan dan disebar luaskan kepada masyarakat**

Langkah Penerapan *Good Governance* Dalam Pelaksanaan KPBU

Pola kerjasama adalah sebagai diagram berikut.



Langkah Penerapan *Good Governance* Dalam Pelaksanaan KPBU



Dalam rangka mewujudkan *good governance*, maka program KPBU harus melakukan prinsip berikut ini:

1. Pemerintah melakukan fungsi ***steering***, yaitu lebih banyak pada aspek pengaturan, penyusunan spesifikasi kerja, pembuatan SOP, pembuatan kontrak, penentuan harga satuan, dan pengawasan mutu dan waktu. Adapun Badan Usaha merupakan unsur pelaksana pembangunan infrastruktur, sedangkan masyarakat melakukan fungsi kontrol.
2. ***Empowering***, terhadap masyarakat berupa perlakuan pemberdayaan (pelatihan, urun pendapat, melakukan monitoring dan evaluasi)

Langkah Penerapan *Good Governance* Dalam Pelaksanaan KPBU



- 3. Meeting the need of consumers**, ini dapat dilakukan pada saat konsultasi publik, apakah pembangunan infrastruktur sudah sesuai dengan kebutuhan, apakah ada usulan2 lain, mana hal2 yang lebih prioritas (air, penerangan, sanitasi, transport).
- 4. Earning**, bagaimana **inovasi pemerintah untuk bisa memperoleh pendapatan daripada pembelanjaan. Sangat dihindarkan untuk mendapat penghasilan dengan menaikkan pajak.**
- 5. Perpres 38/2015 pasal 3 butir d. menyatakan : mendorong digunakannya prinsip pengguna membayar pelayanan yang diterima, atau dalam hal tertentu mempertimbangkan kemampuan membayar pengguna.** Contoh : pembangunan jalan tol, pengolahan sampah jual komposnya, menjual produk daur ulang, layanan parkir umum dan maintenance kendaraan.

Langkah Penerapan *Good Governance* Dalam Pelaksanaan KPBU

A background image showing three men in business suits in a meeting. One man is pointing at a document or screen, while the others look on attentively.

- 6. Prevention**, melakukan pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, baik berupa hambatan fisik, sosial, maupun hukum dan keamanan. Ada hal-hal yang dapat diprediksi sebelumnya mengacu pada pengalaman-pengalaman sebelumnya (keamanan, ganti rugi tanah, upah buruh, dan lainnya). Kemungkinan-kemungkinan ini harus dibahas bersama oleh ke 3 “aktor” pembangunan, dan dipersiapkan solusinya. Keberhasilan pembangunan dan pelayanan masyarakat, adalah merupakan kemenangan bersama.



**WASSALUMUALAIKUM WAROHMATULLAHI
WABAROKATUH DAN TERIMA KASIH**